



Pemkot Terapkan Sistem E-Katalog

Diklaim Lebih Transparan dan Akuntabel dalam Pengadaan Barang dan Jasa

YOGYAKARTA – Kota Yogyakarta menjadi satu dari tiga kota di Indonesia yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa memakai sistem e-katalog daerah. Sistem e-katalog ini diklaim lebih transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Kota Yogyakarta menyusul Jakarta dan Semarang yang sudah mengaplikasikan e-katalog daerah," kata Kepala Badan Bagian Layanan Pengadaan

Kota Yogyakarta, Sukadarisman, sesuai penandatanganan kontrak katalog daerah antara Pemkot Yogyakarta dengan enam perusahaan penyedia ba-

rang dan jasa di Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Dengan sistem e-katalog ini, diakuinya, organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Yogyakarta bisa langsung membeli barang atau jasa kepada vendor yang sudah teken kontrak katalog daerah dengan Pemkot Yogyakarta. Proses pembeliannya pun tak perlu dengan mekanisme lelang seperti tahun-tahun sebelumnya dan tanpa batasan nilai anggaran pengadaan.

"Saat ini baru enam vendor

penyedia barang dan jasa yang sudah tanda tangan kerja sama. Untuk dua kategori, yaitu alat keselamatan dan seragam keamanan, serta bahan konstruksi jalan dan tata air," jelasnya.

Dipaparkannya, keenam vendor tersebut telah melalui proses seleksi ketat dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang ditentukan. Pemkot pun tak menutup peluang untuk menjalin kerjasama dengan vendor kategori barang dan jasa lainnya jika ke depan ada OPD yang memiliki proyek

pengadaan di luar dua kategori yang sudah ada tersebut.

"Proses melalui e-katalog daerah ini sah dan legal karena dipantau langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Justru memiliki keuntungan lebih efisien, transparan, dan efektif. Harganya pun lebih murah dari harga pasaran karena barang langsung dari pabriknya," ungkapnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sulistiyo juga berharap dengan sistem e-katalog ini bisa

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meski demikian, pengawasan tetap akan dilakukan terhadap vendor selaku penyedia barang dan jasa.

Tujuannya untuk memastikan barang dan jasa yang dijual memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang ada. "Monitoring dilakukan secara rutin disertai evaluasi. Bagi penyedia barang dan jasa kami minta tetap menjaga kualitasnya," harap Sulistiyo.

Direktur Pengadaan LKPP,

Firman Darmawan, yang hadir dalam penandatanganan kontrak katalog daerah menyebut keberhasilan Yogyakarta sebagai salah satu daerah pionir yang menerapkan e-katalog daerah dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam upaya transparansi dan percepatan rodapembangunan.

Diakuinya, daerah yang sudah menerapkan e-katalog dapat menghemat belanja hingga 30% sehingga bisa meringankan beban keuangan daerah.

ristu hanafi

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Layanan Pengadaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005